

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013

ABSTRAK	:	<p>a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diganti; • Bahwa kekayaan daerah perlu didayagunakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sehingga atas pemakaiannya dapat dipungut retribusi.
		<p>b.</p> <p>Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Perda Kab. Temanggung No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Temanggung No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Temanggung No. 15 Tahun 2008; Perda Kab. Temanggung No. 17 Tahun 2009.</p>
		<p>c.</p> <p>Peraturan Daerah ini mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek Dan Subjek 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Tata Cara Pemungutan 9. Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Penundaan Pembayaran 10. Sanksi Administratif 11. Tata Cara Penagihan 12. Tata Cara Pengurangan Ddn Keringanan 13. Kedaluwarsa 14. Penghapusan Piutang Retribusi 15. Insentif Pemungutan 16. Pemanfaatan 17. Penyidikan 18. Ketentuan Pidana 19. Ketentuan Penutup
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - Terdapat penjelasan atas Peraturan Daerah ini.

Retribusi Pelayanan Pemakaman
Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2013

ABSTRAK	:	<p>a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk memungut retribusi pelayanan pemakaman; • Bahwa retribusi pemakaman merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
		<p>b.</p> <p>Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Perda Kab. Temanggung No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Temanggung No. 15 Tahun 2008; Perda Kab. Temanggung No. 26 Tahun 2012; Perda Kab. Temanggung No. 1 Tahun 2012; Perda Kab. Temanggung No. 4 Tahun 2013.</p>
		<p>c.</p> <p>Peraturan Daerah ini mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek Dan Subjek 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Tata Cara Pemungutan 9. Tata Cara dan Tempat Pembayaran 10. Sanksi Administratif 11. Tata Cara Penagihan 12. Tata Cara Pengurangan dan Keringanan 13. Kedaluwarsa 14. Penghapusan Piutang Retribusi 15. Insentif Pemungutan 16. Pemanfaatan 17. Penyidikan 18. Ketentuan Pidana 19. Penutup
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - Terdapat penjelasan atas Peraturan Daerah ini.

Pinjaman Daerah
Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2013

ABSTRAK	:	<p>a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa kondisi Pasar Legi Parakan sudah sangat tidak layak sehingga harus dibangun agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung; • Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah maka untuk membiayai Pembangunan Pasar Legi Parakan Pemerintah dapat melakukan pinjaman jangka panjang; • Bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah perlu adanya Peraturan Daerah.
		<p>b.</p> <p>Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kab. Temanggung No. 6 Tahun 2008.</p>
		<p>d.</p> <p>Peraturan Daerah ini mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Jumlah dan Sumber 4. Jangka Waktu 5. Pencairan Pinjaman 6. Pembayaran Kewajiban Pinjaman 7. Pembayaran Pinjaman 8. Pengelola Pinjaman Daerah 9. Kepastian Pembayaran Pinjaman 10. Pembukuan dan Pelaporan 11. Kewajiban Penganggaran dan Pengembalian Pinjaman 12. Ketentuan penutup.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - Terdapat penjelasan atas Peraturan Daerah ini.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung TA 2012
Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2013

ABSTRAK	:	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
		b.	<p>Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2003; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 tahun 2006; Permendagri No. 22 Tahun 2011; Perda Kabupaten Temanggung No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Temanggung No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Temanggung No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Temanggung No. 28 Tahun 2011; Perda Kab. Temanggung No. 24 Tahun 2012; Perda Kab. Temanggung No. 26 Tahun 2012.</p>
		e.	<p>Peraturan Daerah ini mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 2. Pasal 2 3. Pasal 3 4. Pasal 4 5. Pasal 5 6. Pasal 6 7. Pasal 7 8. Pasal 8 9. Pasal 9 10. Pasal 10
CATATAN	:	-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013
 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2013

ABSTRAK	<p>a. • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Layanan Badan Layanan Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan kepala satuan kerja perangkat daerah.</p> <p>b. Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Temanggung No. 17 Tahun 2008.</p> <p>c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 2. Pasal 2
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - Terdapat penjelasan atas Peraturan Daerah ini.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA 2013
Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2013

<p>ABSTRAK</p>	<p>:</p>	<p>a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Temanggung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/195/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013; • Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
		<p>b.</p> <p>Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perda Kabupaten Temanggung No. 4 Tahun 2005; Perda Kabupaten Temanggung No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 14 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 16 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 17 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 18 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Temanggung No. 17 Tahun 2009; Perda Kabupaten Temanggung No. 18 Tahun 2009; Perda Kabupaten Temanggung No. 5 Tahun 2010; Perda Kabupaten Temanggung No. 6 Tahun 2010; Perda Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2010; Perda Kabupaten Temanggung No. 8 Tahun 2010; Perda Kabupaten Temanggung No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Temanggung No. 9 Tahun 2011; Perda Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2011; Perda Kabupaten Temanggung No. 19 Tahun 2011; Perda Kabupaten Temanggung No. 23 Tahun 2011; Perda Kabupaten Temanggung No. 24 Tahun 2011; Perda Kabupaten Temanggung No. 2 Tahun 2012;</p>

		Perda Kabupaten Temanggung No. 3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 4 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 5 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 6 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 8 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 9 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 11 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 12 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 13 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 26 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2013; Perda Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2013; Permendagri No. 13 tahun 2006; Permendagri No. 27 Tahun 2012.
	c.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 2. Pasal 2 3. Pasal 3 4. Pasal 4 5. Pasal 5 6. Pasal 6 7. Pasal 7 8. Pasal 8 9. Pasal 9 10. Pasal 10
CATATAN	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA 2014
 Tahun 2013
 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013

<p>ABSTRAK</p>	<p>:</p>	<p>a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; • bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
		<p>b.</p> <p>Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perda Kabupaten Temanggung No. 4 Tahun 2005; Perda Kabupaten Temanggung No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 14 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 16 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 17 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 18 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Temanggung No. 17 Tahun 2009; Perda Kabupaten Temanggung No. 18 Tahun 2009; Perda Kabupaten Temanggung No. 5 Tahun 2010; Perda Kabupaten Temanggung No. 6 Tahun 2010; Perda Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2010; Perda Kabupaten Temanggung No. 8 Tahun 2010; Perda Kabupaten Temanggung No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Temanggung No. 9 Tahun 2011; Perda Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2011; Perda Kabupaten Temanggung No. 19 Tahun 2011; Perda Kabupaten Temanggung No. 23 Tahun 2011; Perda Kabupaten Temanggung No. 24 Tahun 2011; Perda Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 4 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 5 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 6 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 8 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 9 Tahun 2012; Perda</p>

		Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 11 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 12 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 13 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 26 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2013; Perda Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2013; Permendagri No. 13 tahun 2006; Permendagri No. 37 Tahun 2013.
	c.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 2. Pasal 2 3. Pasal 3 4. Pasal 4 5. Pasal 5 6. Pasal 6 7. Pasal 7 8. Pasal 8 9. Pasal 9 10. Pasal 10
CATATAN	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.